

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamka Hendra Noer, Ph.D. (2014). *Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Miriam Budiardjo. (2008). *Pengantar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mifta Thoha. (2018). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham. (2017). *Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Muh. Fitrah, S.P., M.P dan Luthfiah, M. . (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV JEJAK.
- Mosher, F. C. (1968). *Democracy and the Public Service*. New York: Oxford University Press.
- Prihatmoko. (2008). *Men demokratis kan pemilu*. Pustaka Jaya.
- Prodjodikoro, W. (1990). *Perbuatan Melanggar Hukum*. Sumur.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. In Alfabeta, cv.
- RI, B. (2024). *Himbauan Netralitas ASN*.
- Sarjiyati, Anik Tri Haryani, B. H. S. (2022). *Netralitas ASN dalam Pemilu*. Deepublish.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. PT.Grasindo.
- Tiicahyono, L. (2009). *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*. In Trans Publishing.
- Uma. (2006). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Viera Restuani Adia. (2023). *Birokrasi Dan Governansi Publik*. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.

Jurnal

- Adhi. (2020). Netralitas pegawai negeri sipil. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS*, 3(1).
- Amir, & Hertanto. (2023). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024. *Journal Publicuho*, 6(2), 466–476. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.123>
- Andriyansyah, M. F. (2024). *Pilkada Serentak 2024 : Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulannya*. 05.

- Asmawi. (2014). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah. *Jurnal Cita Hukum*, II(1), 1–18.
- Budiman, M. (2017). Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial. *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(1), 29–47. <https://doi.org/10.33096/aijih.v20i1.5>
- Bobby Rahman, M. Akmal, Teuku Muzaffarsyah, Z., & Bimby Hidayat. (2023). Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong Keude Jirat Manyang Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara. *Indonesian Community Service and Empowerment Journal*, 4(1), 356 – 366. <https://doi.org/10.20961/jv.v8i3.47058>
- Endah, K., & Vestikowati, E. (2021). Birokrasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal MODERAT*, 7(3), 648.
- Firmansyah Putra dan Cholillah Suci Pratiwi. (2019). *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Jambi Tahun 2020*.
- Harahap, I. H. (2024). *Analisis Netralitas ASN pada Pemilu dalam Mewujudkan Transformasi Birokrasi*. 2.
- Leleng. (2018). Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 di Kabupaten Minahasa Selatan. *Ilmu Pemerintahan*, 1, 1–13.
- Lovita, A. J., & Adnan, M. F. (2021). Implementasi Prinsip Transparansi Dan Imparsialitas Dalam Pelaksanaan Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Siak, Riau. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4), 1076–1085. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2425>
- Ibrahim, Z. (2018). PEER REVIEW; Perilaku Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.
- Meilisa, A. (2019). Netralitas Asn Dalam UU. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 55–80.
- Montheza, R., & Taqwim, A. (2024). *Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Pada Kontestasi Pemilu 2024 : Studi Kasus Instagram @ Abdimuda _ Id State Civil Service (Asn) Neutralities In The 2024 General Election On Instagram*. 247–266.
- Moshinsky. (1959). Netralitas Aparatur Sipil Negara. *Nucl Phys*, 13(1), 104–116.
- Mulyadi, Rosalina, T. A. (2024). *Dinamika politik dan strategi kemenangan partai kebangkitan bangsa di bener meriah*. 5(2), 219-234.
- Naufal. (2024). *Penerapan Prinsip Imparsialitas Hakim Praperadilan Dalam Penanganan Kasus Error In Persona*. 3(3), 754–770.
- Nuraida Mokhsen, S. D., & Syaugi Muhammad, N. H. (2018). *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*. Komisi Aparatur Sipil Negara.

- No. (2018). *Jurnal Panorama Hukum Jurnal Panorama Hukum*. 3(1), 87–104.
- Onibala, D. A., Gosal, R., & Kasenda, V. (2019). Jurnal Eksekutif. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol 03, No 3, 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/jurnaleksekutif/article/view/23849/23498>
- Sudarsono. (2020). *Penerapan Sanksi Pidana Denda Sebagai Upaya Menekan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Kota ternate*. 1–64.
- Sumarlin, W., Rentika, R., & Andrianika, S. (2024). *Dinamika Netralitas Asn Dalam Partisipasi Dan Dukungan Politik Menuju Pilkada Serentak 2024 Dynamics Of State Civil Apparatus Neutrality In Political Participation And Support Towards The 2024 Simultaneous Regional Head Elections Pendahuluan Indonesia men*. 223–246.
- Teuku, M., Akmal, M., & Fitratulaini, S. (2019). Strategi Calon Legislatif Perempuan Partai Demokrat Dalam Memobilisasi Dukungan Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota *Jurnal Politik Dan ...*, 4, 19–31. <http://repository.unimal.ac.id/id/eprint/5266>
- Thoha, M. (2008). *Menejemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Hlm. 8.

Website

- DJKN Kemenkeu+2dumai.bawaslu.go.id+2<https://sulbar.kemenag.go.id+2>
- Fatimah. (2024). *Asas asas pemilu di indonesia*. DetikSulsel. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7167168/6-asas-pemilu-di-indonesia-lengkap-dengan-penjelasan-nya-wni-wajib-tahu>
- Kampuspedia. *Aparatur Sipil Negara (ASN)*. 12 Desember 2024. <https://campus.quipper.com/kampuspedia/aparatur-sipil-negara-asn>
- Presiden Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara*. 202875, 1–44. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023>
- <https://www.antaranews.com/berita/3858354/ketua-dkpp-ri-birokrasi-netral-adalah-syarat-pemilu-demokratis>
- <https://bkpsdm.asahankab.go.id/detailpost/data-sbt-bkn-tahun-2024-selama-pemilu-2024-ada-47-laporan-dugaan-pelanggaran-netralitas>

Undang Undang

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Skripsi

- Amin. (2013). *Netralitas Birokrat Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Kota Makassar Dalam Pemilihan Walikota Makassar (Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2008)*.
- Konstitusi, D. A. N., & Perspektif, D. (1945). *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Oleh; Program Pasca Sarjana Program Studi Hukum Tata Negara (Syiasah) Universitas Islam Negri Fatmawati Soekarno (Uinfas) Bengkulu*.
- Rais, A. (2022). *Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Politik Praktis Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Selatan*.